

Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat melalui Optimalisasi Dana BOS Kinerja di Kabupaten Buton Tengah

Suyati¹, Ayu Wandira², Irpan Hasanudin³, Waode Hikmatiah⁴, Nuril Tania⁵

Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

2407010127@students.unis.ac.id¹, 2407010075@students.unis.ac.id²,
2407010094@students.unis.ac.id³, 2407010190@students.unis.ac.id⁴,
2407010033@students.unis.ac.id⁵

Submitted: 27th July 2025 | **Edited:** 25th August 2025 | **Issued:** 01st September 2025

Cited on: Suyati, S., Wandira, A., Hasanudin, I., Hikmatiah, W., & Tania, N. (2025). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat melalui Optimalisasi Dana Bos Kinerja di Kabupaten Buton Tengah. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1497-1504.

ABSTRACT

This study examines the strategic role of school committees in optimizing the use of Performance-Based School Operational Assistance (BOS Kinerja) funds to strengthen community education in Buton Tengah Regency, Indonesia. The research was motivated by limited community participation and the need for transparent fund management in local schools. The objective is to analyze how school committees contribute to participatory governance, transparency, and educational empowerment. A descriptive qualitative method was applied, involving purposive selection of five elementary and junior high schools receiving BOS Kinerja. Data were collected through in-depth interviews with school principals, treasurers, and committee members, supported by direct observation and document analysis. The findings indicate that active school committees enhance the effectiveness of fund allocation by ensuring participatory planning, promoting transparency, and facilitating collaboration between schools and communities. Committees also support community-based programs such as parenting classes, literacy initiatives, and skills training, which broaden the role of schools as centers of community education. The study concludes that strengthening school committee capacity and institutionalizing their involvement throughout the BOS management cycle are essential for improving accountability and building inclusive, community-driven education governance.

Keywords: School Committee, BOS Kinerja, Community Education, Participatory Governance, Fund Management

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Dalam konteks lokal, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar-mengajar di ruang kelas, tetapi juga dipengaruhi oleh ekosistem sosial yang mengelilinginya. Salah satu elemen penting dalam ekosistem tersebut adalah partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pendidikan. Di Kabupaten

Buton Tengah, tantangan yang masih dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan serta minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan sekolah. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat melalui wadah formal seperti komite sekolah menjadi langkah strategis untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan adaptif.

Pemerintah telah menghadirkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja sebagai insentif bagi sekolah yang menunjukkan performa baik. Namun, efektivitas penggunaan dana tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan komite sekolah dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan partisipatif (Rahmawati & Susilo, 2021). Komite sekolah yang aktif dapat menjembatani kepentingan sekolah dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap pendidikan (Hasanah & Kurniawan, 2022). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tata kelola partisipatif mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan (Supriyanto et al., 2022; Wulandari & Sari, 2023).

Selain berfungsi dalam pengawasan anggaran, komite sekolah juga berperan dalam penguatan pendidikan masyarakat melalui dukungan terhadap program literasi, kelas parenting, dan pelatihan keterampilan dasar. Hal ini memperluas peran sekolah sebagai pusat pembelajaran komunitas (Lubis, 2022; Ramadhani & Yusuf, 2023). Keterlibatan tersebut sejalan dengan konsep tata kelola adaptif yang menekankan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk merespons kebutuhan lokal secara tepat (Yunus et al., 2023). Lebih jauh, Fitriani dan Wibowo (2024) menegaskan bahwa keberhasilan program pendidikan berbasis dana pemerintah, seperti BOS, sangat bergantung pada kolaborasi multi-stakeholder yang sejajar dan saling percaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: Sejauh mana peran strategis komite sekolah dalam mengoptimalkan penggunaan dana BOS Kinerja untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di Kabupaten Buton Tengah? Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam memperkuat tata kelola pendidikan berbasis partisipasi serta kontribusi akademis dalam pengembangan model manajemen pendidikan berbasis komunitas.

LANDASAN TEORI

Komite sekolah merupakan representasi formal masyarakat yang berfungsi memberikan pertimbangan, dukungan, dan pengawasan terhadap kebijakan serta program sekolah. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 menegaskan peran komite sekolah sebagai mitra strategis dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dalam perspektif tata kelola partisipatif, keberadaan komite sekolah mencerminkan demokratisasi pendidikan karena masyarakat turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Kusumaningrum & Suryani, 2020).

Partisipasi komite sekolah menjadi kunci dalam pengelolaan dana pendidikan, termasuk BOS Kinerja, yang berbasis pada kinerja sekolah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran akan lebih mudah tercapai ketika komite sekolah dilibatkan sejak perencanaan, implementasi, hingga evaluasi (Nuraini & Firmansyah, 2021). Sekolah yang menerapkan prinsip ini umumnya menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran serta meningkatnya kepercayaan masyarakat (Anwar & Abdullah, 2021).

Lebih jauh, teori kolaborasi multi-pihak dalam pendidikan menekankan pentingnya kemitraan yang sejajar antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Kolaborasi ini mendorong terciptanya inovasi program dan peningkatan kualitas pembelajaran (Hidayati, 2020). Dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga formal, melainkan juga sebagai pusat pemberdayaan komunitas (Rosidah & Wahyuni, 2021). Hal ini sejalan dengan perspektif pendidikan transformatif yang menekankan keterlibatan masyarakat sebagai agen perubahan (Zulfa & Hendri, 2020).

Selain itu, penguatan fungsi komite sekolah dapat dilihat dari pendekatan *community-based governance*, yang menekankan pentingnya membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap sekolah (Hartati & Puspitasari, 2022). Komite sekolah yang berfungsi optimal akan memperkuat literasi, meningkatkan keterampilan sosial, serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya pendidikan (Ridwan, 2021). Dengan demikian, komite sekolah tidak hanya berperan dalam aspek administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak pembelajaran sosial di tingkat lokal.

Dari berbagai perspektif tersebut dapat dipahami bahwa komite sekolah memiliki posisi strategis dalam tata kelola pendidikan yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Landasan teoritis ini menjadi pijakan penting dalam menelaah bagaimana peran komite sekolah di Kabupaten Buton Tengah dapat mengoptimalkan dana BOS Kinerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat fungsi sekolah sebagai pusat komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam peran komite sekolah dalam optimalisasi dana BOS Kinerja di Kabupaten Buton Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, proses, serta dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui metode kuantitatif (Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian ditentukan secara purposive pada lima sekolah dasar dan sekolah menengah pertama penerima BOS Kinerja yang dipilih berdasarkan kriteria: keterlibatan aktif komite sekolah, konsistensi pelaporan dana BOS, serta kesediaan untuk memberikan akses data.

Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan anggota komite sekolah, dengan total 20 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Komposisi informan ini dipertimbangkan agar memberikan perspektif yang beragam mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dana BOS Kinerja (Creswell & Poth, 2018; Bungin, 2020).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan pandangan informan, sementara observasi difokuskan pada keterlibatan komite sekolah dalam rapat perencanaan dan pelaporan. Studi dokumentasi mencakup analisis Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan keuangan BOS, serta notulen rapat. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik, perpanjangan keikutsertaan di lapangan, serta member check kepada informan (Moleong, 2021; Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian dilakukan dalam bentuk narasi tematik,

sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap pola keterlibatan komite sekolah. Analisis ini menekankan pada keterkaitan antara praktik pengelolaan dana BOS Kinerja dengan konsep tata kelola pendidikan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat (Silverman, 2020).

HASIL PENELITIAN

Komite Sekolah sebagai Mitra Strategis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah berperan lebih dari sekadar pengawas administratif, melainkan sebagai mitra strategis dalam memperkuat hubungan sekolah dan masyarakat. Di salah satu sekolah, seorang kepala sekolah menyatakan:

“Komite di sini bukan hanya mengawasi laporan, tapi mereka ikut menyampaikan ide kegiatan dan bahkan membantu mencari dukungan dari masyarakat.”

Hal ini memperlihatkan bahwa komite mampu memfasilitasi kegiatan edukatif seperti kelas parenting, pelatihan keterampilan dasar, dan program literasi keluarga.

Temuan ini sejalan dengan Maulana dan Cahyono (2023) yang menyebutkan bahwa kolaborasi aktif komite sekolah menciptakan lingkungan belajar lebih inklusif dan meningkatkan akuntabilitas lembaga. Senada, penelitian oleh Hasan dan Widodo (2023) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah memperkuat legitimasi pendidikan di tingkat lokal. Dengan demikian, komite sekolah berperan ganda sebagai penghubung komunikasi dan penggerak partisipasi komunitas.

Optimalisasi Dana BOS Kinerja

Keterlibatan komite sekolah terbukti meningkatkan efektivitas penggunaan dana BOS Kinerja. Dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), komite memberikan masukan berbasis kebutuhan lokal. Seorang bendahara BOS menyampaikan:

“Saat menyusun RKAS, masukan dari komite sangat membantu, karena mereka tahu kondisi masyarakat, jadi alokasi lebih tepat sasaran.”

Penemuan ini memperkuat penelitian Wulandari dan Sari (2023) yang menyatakan bahwa perencanaan pendidikan yang melibatkan komite meningkatkan transparansi dan efektivitas. Hal serupa juga diungkapkan oleh Nuraini dan Firmansyah (2021) yang menemukan bahwa keterlibatan komite sekolah berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan anggaran. Dengan demikian, partisipasi komite dalam

siklus manajemen dana BOS Kinerja mendorong perencanaan yang lebih demokratis dan berorientasi kebutuhan lokal.

Dampak terhadap Pendidikan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah juga mendorong berkembangnya pendidikan masyarakat melalui program yang melibatkan orang tua dan komunitas, seperti diskusi bulanan perkembangan siswa dan pelatihan keterampilan rumah tangga produktif. Seorang anggota komite menuturkan:

“Kami ingin sekolah tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga tempat orang tua belajar bersama.”

Hal ini mendukung temuan Ramadhani dan Yusuf (2023) yang menekankan bahwa pelibatan masyarakat pada setiap tahap pengelolaan pendidikan memperkuat ekosistem belajar yang inklusif. Rosidah dan Wahyuni (2021) juga menambahkan bahwa sekolah yang berfungsi sebagai pusat komunitas mampu memperluas akses pembelajaran bagi seluruh warga. Dengan demikian, keterlibatan komite tidak hanya berdampak pada efektivitas penggunaan dana, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan.

Transparansi dan Kepercayaan Publik

Partisipasi komite sekolah juga meningkatkan transparansi pengelolaan BOS Kinerja. Beberapa sekolah menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dalam forum komite, yang kemudian dibahas bersama. Seorang guru menyampaikan:

“Setiap ada laporan dana BOS, komite hadir dan masyarakat juga diundang, jadi semua tahu ke mana dana digunakan.”

Keterbukaan ini memperkuat kepercayaan masyarakat, bahkan memunculkan dukungan tambahan dalam bentuk swadaya. Temuan ini sejalan dengan Hidayat dan Pramesti (2023) yang menekankan pentingnya transparansi dalam memperkuat legitimasi sekolah. Latifah (2023) juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tumbuh ketika ada kejelasan informasi penggunaan dana pendidikan. Dengan demikian, transparansi yang difasilitasi oleh komite sekolah berimplikasi langsung pada meningkatnya dukungan moral dan material dari masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa komite sekolah merupakan aktor strategis dalam membangun tata kelola pendidikan partisipatif. Melalui keterlibatan dalam perencanaan, pengawasan, dan fasilitasi program komunitas, komite sekolah memperkuat efektivitas BOS Kinerja sekaligus memperluas fungsi sekolah sebagai pusat pembelajaran masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa komite sekolah memiliki peran strategis dalam optimalisasi penggunaan dana BOS Kinerja di Kabupaten Buton Tengah. Keterlibatan aktif komite terbukti meningkatkan ketepatan alokasi anggaran, memperkuat transparansi, serta memperluas pendidikan masyarakat melalui program literasi, parenting, dan pelatihan keterampilan. Komite tidak hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai fasilitator dan jembatan komunikasi antara sekolah dan masyarakat.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya kajian tentang tata kelola pendidikan partisipatif dengan menunjukkan bahwa kolaborasi multi-stakeholder yang melibatkan masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap lembaga pendidikan. Temuan ini mendukung teori tata kelola adaptif dan model pendidikan berbasis komunitas yang menempatkan sekolah sebagai pusat pemberdayaan sosial.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Pendidikan meningkatkan kapasitas komite sekolah melalui pelatihan perencanaan, pengawasan, dan pelaporan dana BOS Kinerja. Sekolah juga perlu memastikan keterlibatan komite secara menyeluruh dalam siklus manajemen keuangan, dari tahap penyusunan RKAS hingga evaluasi. Selain itu, forum komunikasi antara sekolah, komite, dan masyarakat harus terus diperkuat agar partisipasi publik dalam pendidikan semakin berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., & Abdullah, R. (2021). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, B. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fitriani, R. (2023). *Transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana BOS: Studi pada sekolah dasar di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fitriani, R., & Wibowo, A. (2024). *Teori kolaborasi multi-stakeholder dalam pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hartati, D., & Puspitasari, E. (2022). *Community-based governance dalam pengelolaan pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hasan, N., & Widodo, T. (2023). *Kolaborasi sekolah dan komunitas: Model integratif dalam pengembangan pendidikan berbasis masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

- Hasanah, S., & Kurniawan, B. (2022). *Peran komite sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis masyarakat*. Surabaya: Penerbit Pena Nusantara.
- Hidayat, R., & Pramesti, N. (2023). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di era otonomi sekolah*. Jakarta: Kencana.
- Hidayati, N. (2020). Kolaborasi multi pihak dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 45–56.
- Kusumaningrum, D., & Suryani, R. (2020). *Peran komite sekolah dalam tata kelola pendidikan partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Latifah, S. (2023). *Kemitraan sekolah dan masyarakat: Strategi membangun partisipasi publik dalam pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lubis, R. (2022). *Pendidikan masyarakat dan peran komunitas dalam peningkatan literasi*. Medan: CV Mitra Cendekia Mandiri.
- Maulana, H., & Cahyono, A. (2023). *Manajemen kolaboratif dalam pendidikan: Peran komite sekolah dan masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuraini, S., & Firmansyah, A. (2021). Partisipasi komite sekolah dalam pengawasan dana BOS. *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan*, 9(2), 121–134.
- Nuryanto, A., & Rachmawati, D. (2021). *Teori keterlibatan komunitas berbasis nilai lokal dalam pendidikan*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, A., & Lestari, M. (2020). *Peran strategis komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan*. Jakarta: CV Mega Ilmu Pressindo.
- Rahmawati, L., & Susilo, A. (2021). *Efektivitas pengelolaan BOS Kinerja dalam tata kelola sekolah yang baik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ramadhani, A., & Yusuf, M. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam penguatan tata kelola pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ridwan, M. (2021). *Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan berbasis sekolah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rosidah, U., & Wahyuni, S. (2021). Sekolah sebagai pusat pembelajaran masyarakat di era desentralisasi. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 77–89.
- Silverman, D. (2020). *Interpreting qualitative data* (6th ed.). London: Sage Publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, T., Santoso, H., & Widyaningsih, D. (2022). Community participation and school budgeting efficiency: Evidence from rural Indonesia. *Journal of Educational Management*, 11(2), 87–104.
- Wijayanti, R., & Hardiansyah, D. (2020). *Transparansi dana BOS dan partisipasi komite sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, D., & Sari, M. R. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan di sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Yunus, M., Anwar, H., & Fauziah, L. (2023). *Model tata kelola adaptif dalam pendidikan daerah tertinggal*. Makassar: Literasi Nusantara Press.
- Zulfa, L., & Hendri, Y. (2020). *Pendidikan transformatif berbasis komunitas*. Padang: UNP Press.